

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Madrasah merupakan lembaga kependidikan Islam yang menjadi cermin sebagai umat Islam. Fungsi dan tugasnya adalah merealisasikan cita-cita umat Islam yang menginginkan anak-anak dididiknya menjadi manusia yang beriman dan berilmu pengetahuan.

Lembaga pendidikan dalam bentuk madrasah sudah ada sejak agama Islam berkembang di Indonesia. Madrasah sudah tumbuh dan berkembang di bawah dalam arti masyarakat (umum) yang didasari oleh rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ajaran Islam kepada generasi penerus penyempurnaan dan peningkatan mutu pendidikan madrasah sejalan dengan laju perkembangan dan aspirasi madrasah (Muzzayin Arifin, 2003 : 159-160).

Madrasah pada umumnya swasta, berasal dari lingkungan masyarakat yang belum beruntung. Strategi pemberdayaan madrasah tingkat dasar juga dimaksudkan sebagian bagian dari program penuntasan wajar, yakni untuk memberikan tempat bagi anak-anak usia pendidikan dasar untuk dapat bersekolah. Program-program dalam upaya memberdayakan madrasah tersebut terutama berupa fisik, pelatihan, biaya operasional, beasiswa dan lain-lain.

Keberhasilannya lebih ditentukan kepada peran birokrat atau aparat pemerintah, namun keberhasilan pendidikan secara berkualitas akan lebih banyak tergantung pada peran guru-guru dan penyelenggara madrasah itu sendiri, karena bagaimanapun bagus sekolah, canggihnya peralatan penunjang pembelajaran yang tersedia, jika guru atau tenaga pengajarnya tidak mampu, maka resiko kegagalan pun akan sangat tinggi (Abdul Rohman Sheleh, 2004:43).

Untuk semua proses dan kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan dapat memenuhi harapan para stakeholdernya maka dibutuhkan pengelolaan biaya yang profesional baik dalam penggalian sumber dana maupun pendistribusian dananya. Untuk itu madrasah hendaknya memenuhi standar pembiayaan minimal.

Pembiayaan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan SDM dan modal kerja tetap. Adapun biaya personal mencakup biaya-biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti kegiatan pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan biaya operasi madrasah mencakup:

1. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji.
2. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai.
3. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, komunikasi, pajak, asuransi dan lain-lain (Khaeruddin dan Mafrud Junaedi dkk, 2007 : 67).

Dunia pendidikan di era global telah terjadi perubahan yang signifikan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang dengan pesat, akibatnya persaingan pendidikan sangat kuat, mengingat pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam kehidupan.

Pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan mempengaruhi secara penuh pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Dalam meningkatkan kualitas manusia

Indonesia, pemerintah tidak merupakan satu sistem yang lepas dengan pihak swasta dan masyarakat. Hubungan yang tidak terpisahkan dalam peranannya untuk meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan (Nanang Fattah, 2000:77).

Pendidikan merupakan salah satu factor untuk mencapai tujuan nasional Negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 pada pasal 31 ayat 1 s/d 3 dinyatakan bahwa: *(1) Setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan; (2) Setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; Serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Menyadari betapa pentingnya pendidikan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan tujuan nasional, maka wajib bagi pemerintah untuk terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan bangsa Indonesia.*

Secara khusus, pendidikan merupakan suatu wahana untuk mengembangkan potensi yang ada dalam setiap manusia. Melalui pendidikan manusia dapat menemukan dan mengembangkan potensi yang ada pada dirinya. Hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 03 bahwa :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab (Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab II Pasal 3, 2006: 76).

Sementara itu, pendidikan nasional kita menghadapi masalah antara lain peningkatan kualitas, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia dan belum terpenuhi sumber daya dari masyarakat secara profesional sesuai dengan prinsip pendidikan sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua.

Menurut Handayani, persoalan pendidikan di Indonesia antara lain adalah :  
1) kurangnya tenaga guru yang professional, 2) kinerja dan kesejahteraan guru yang belum optimal, 3) proses pembelajaran yang konvensional, 4) keterbatasan anggaran pendidikan, 5) rendahnya mutu SDM pengelola pendidikan, 6) mutu lulusan dan *life skill* yang di hasilkan tidak sesuai kebutuhan, dan 7) pendidikan yang belum berbasis masyarakat dan lingkungan.

Dalam pencapaian pendidikan yang berkualitas, pendidikan mempunyai standar acuan agar tercapainya pendidikan yang di harapkan. Acuan ini dijadikan standar pada sebuah lembaga pendidikan agar tujuan pendidikan yang berkualitas dapat tercapai. Diantara standar yang menjadi acuan ialah :

*Standar Kopetensu Lulusan*, berfungsi sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik. Proses penilaian dalam menentukan kelulusan peserta didik dalam hal kognitif, afektif psikomotorik.

*Standar Isi*, merupakan cakupan sekumpulan pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Meliputi, kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan.

*Standar Proses*, ialah proses pembelajaran yang dilakukan pada satuan pendidikan. Artinya segala kegiatan yang akan berlangsung di dalam kelas, biasa disebut sebagai Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Baik dalam perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengawasan pembelajaran. Hal semua itu harus disusun serapih mungkin, agar proses kegiatan belajar mengajar yang berlangsung didalam kelas dapat berjalan dengan baik.

*Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan*. Seorang pendidik yang terdapat di suatu instansi pendidikan harus mempunyai kompetensi yang baik. Pengembangan kompetensi bisa berupa pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak sekolah ataupun dari pemerintah daerah. Hal ini bertujuan agar pendidik dan tenaga pendidik berkompentensi dalam bidangnya, mudah dalam mengatasi segala problematika yang dihadapi dalam pekerjaan diruang lingkupn lembaga pendidikan.

*Standar sarana dan prasarana*. Karakteristik institusi pendidikan yang berkualitas ialah dengan memiliki sarana dan prasarana yang baik. Mencakup ruang belajar, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, dalam keadaan baik. Artinya semua berfungsi seutuhnya.

*Standar pengelolaan pendidikan*, Standar pengelolaan ialah standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan kabupaten/kota, provinsi, atau Nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

*Standar Pembiayaan Pendidikan*, Pembiayaan pendidikan meliputi pada tiga hal (a) biaya satuan pendidikan (b) biaya penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan (c) biaya pribadi peserta didik.

*Standar penilaian pendidikan*, Penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidik, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah.

Dengan delapan standar tersebut dapat menciptakan pendidikan yang berkualitas, dan salah satu standar pendidikan yang terpenting adalah melalui standar pembiayaan pendidikan. Biaya pendidikan merupakan komponen yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Sehingga dapat dikatakan bahwa proses pendidikan tidak dapat berjalan tanpa dukungan biaya (Dedi Supriyadi, 2006: 3)

Pembiayaan pendidikan adalah merupakan jumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagai keperluan penyelenggaraan pendidikan yang mencakup gaji guru, peningkatan profesional guru, pengadaan sarana ruang belajar, perbaikan ruang pengadaan peralatan/ mobile, pengadaan alat-alat dan buku pelajaran, alat tulis kantor (ATK), kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan pengelolaan pendidikan, dan supervisi pendidikan (Nanang Fattah, 2000 : 23). Pembiayaan pendidikan tersebut harus digunakan untuk membayar semua sumberdaya yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan, dengan demikian biaya pendidikan haruslah dikelola dengan baik agar biaya atau dana yang sudah diperoleh dapat dimanfaatkan dengan tepat sesuai sasaran.

Komponen pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan lembaga bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan

Pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal tersebut menuntut kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggung-jawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan pemerintah.

Pengelolaan terhadap pembiayaan pendidikan membutuhkan adanya sistem manajemen yang baik, dengan demikian pendidikan yang diselenggarakan harus berkaitan erat dengan suatu manajemen. Menurut James AF Stoner yang dikutip Handoko, manajemen sebagai suatu disiplin keilmuan yang secara singkat diartikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan (2001 : 8).

Mengingat pentingnya peran pembiayaan dan keuangan dalam proses pembelajaran, maka tidak dapat dihindari adanya tata kelola keuangan yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan. Tata kelola keuangan ini selanjutnya disebut sebagai manajemen pembiayaan Pendidikan, yaitu pengelolaan semua bentuk keuangan baik usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai

aktivitas atau kegiatan program pendidikan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyusunan anggaran (*budgeting*), pembukuan (*accounting*), pemeriksaan (*accounting*) (Hartati Sukirman, dkk, 2008: 31).

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Cililin merupakan salah satu madrasah yang berdiri di daerah pedesaan. Madrasah ini bisa dikatakan menjadi tempat harapan untuk menuntut ilmu bagi masyarakat di daerah itu. Masyarakat desa yang pada umumnya berada dalam kondisi masyarakat ekonomi kelas menengah ke bawah berharap agar penyelenggaraan pendidikan di daerahnya di selenggarakan dengan biaya yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Pemerintah dalam hal ini tentu saja turut ikut serta membantu terselenggaranya pendidikan di daerah pedesaan.

Di sinilah letak peran penting sebuah lembaga pendidikan untuk bisa mengelola pembiayaannya dengan baik agar dana yang ada dapat dimaksimalkan untuk peningkatan mutu pendidikan. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagai dituntut untuk bisa menyelenggarakan pendidikan dengan biaya yang tidak terlalu tinggi tapi harus tetap terus meningkatkan mutu pendidikan sekolahnya agar sekolah tersebut mampu bersaing dengan sekolah lainnya. Untuk memenuhi hal tersebut diperlukanlah suatu pengelolaan keuangan melalui sebuah manajemen pembiayaan yang baik untuk meningkatkan mutu madrasah mendapatkan dana untuk menyelenggarakan pendidikan dan bagaimana madrasah mengelola dana tersebut untuk meningkatkan mutu pendidikan



Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Manajemen Pembiayaan Madrasah Aliyah Negeri Cililin (Penelitian di Madrasah Aliyah Negeri Cililin)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penganggaran (*Budgeting*) Pembiayaan di Madrasah di Aliyah Negeri Cililin?
2. Bagaimana pencatatan Keuangan (*Accounting*) Pembiayaan di Madrasah Aliyah Negeri Cililin?
3. Bagaimana pengawasan Keuangan (*Auditing*) di Madrasah Aliyah Negeri Cililin?
4. Bagaimanakah hasil penelitian Pembiayaan di Madrasah Aliyah Negeri Cililin?
5. Apa fafktor penghambat dan pendukung manajemen pembiayaan di Madrasah Aliyah Negeri Cililin ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pembiayaan madrasah di Aliyah Negeri Cililin secara rinci tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Penganggaran (*Budgeting*) Pembiayaan di Madrasah Aliyah Negeri Cililin.
2. Untuk Mengetahui Pencatatan Keuangan (*Accounting*) Pembiayaan Madrasah di Aliyah Negeri Cililin.

3. Untuk Mengetahui Pengawasan Keuangan (*Auditing*) Pembiayaan di Madrasah di Aliyah Negeri Cililin.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Secara Teoritis**

Peneliti ini dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan keilmuan, mengenai permasalahan dalam bidang manajemen pembiayaan pendidikan di madrasah/sekolah.

##### **2. Secara Praktis**

Peneliti dapat menjadi sumber informasi sebagai bahan pertimbangan yang berkaitan dengan manajemen pembiayaan di lembaga-lembaga pendidikan secara umum maupun di Madrasah Aliyah Negeri Cililin secara khusus.

#### **E. KERANGKA PEMIKIRAN**

Sistem pembiayaan pendidikan di Indonesia sekarang menurut ketentuan Undang-Undang (UU) no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SPN) fasal 46 menyebutkan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. (Direktorat Jendral Pendidikan Islam Departemen Agama RI Undang-undang dan Peraturan Republik Indonesia tentang Pendidikan No.20 tahun 20003 : 30-31).

Peraturan Pemerintah (PP) No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 62 menyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri dari biaya investasi, biaya operasi dan biaya personal. Biaya investasi meliputi biaya sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia

dan modal kerja tetap. Biaya operasi meliputi gaji, bahan habis pakai dan biaya tak langsung. Dan biaya personal meliputi biaya yang dikeluarkan untuk mengikuti proses pendidikan seperti pakaian, transpor, buku, konsumsi dan biaya pribadi lainnya (Departemen Pendidikan Nasional (2005) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005).

Manajemen didefinisikan sebagai suatu proses sosial, yang direncanakan untuk menjamin kerjasama, partisipasi, intervensi dan keterlibatan orang lain dalam mencapai sasaran tertentu atau yang telah ditetapkan dengan efektif.

Manajemen berorientasi pada proses (*process oriented*) yang berarti bahwa manajemen membutuhkan sumber daya manusia, pengetahuan, dan keterampilan agar aktivitas lebih efektif atau dapat menghasilkan tindakan dalam mencapai kesuksesan (Dr. Samsyir Torang, 2014 : 165).

Sedangkan proses manajemen terdiri dari 4 unsur yaitu *pertama*, perencanaan meliputi penciptaan, penyusunan program dan penyusunan proyek. *Kedua*, pengorganisasian meliputi perakitan sumber dan pengstafan. *Ketiga*, pengarahan meliputi motivasi, supervise dan koordinasi. *Keempat*, pengawasan meliputi penganggaran, pelaporan dan evaluasi.

Dalam pengertian sehari-hari istilah pembiayaan yang berasal dari kata *finance* dikaitkan dengan usaha memperoleh atau mengumpulkan modal untuk membiayai aktivitas yang akan dilakukan (Harbangan Siagian, 1989 : 130).

Dengan demikian yang dimaksud dengan manajemen pembiayaan adalah pengelolaan semua bentuk keuangan baik pemasukan dan pengeluaran yang

secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan, baik yang dikeluarkan oleh sekolah maupun siswa.

Tahapan manajemen pembiayaan meliputi :

1. Penganggaran (*Budgeting*)

*Budget* atau anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga dalam kurun waktu tertentu. Oleh karena itu dalam anggaran terdapat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu lembaga. (Nanang Fatah, 2009 : 47).

Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan dalam melaksanakan tugasnya menerima dana dari berbagai sumber. Penerimaan dana dari berbagai sumber tersebut perlu dikelola dengan baik dan benar. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber perlu digunakan untuk kepentingan sekolah khususnya kegiatan belajar mengajar secara efektif dan efisien. Sehubungan dengan itu, setiap perolehan dana, penggunaannya harus didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang telah disesuaikan dengan RAPBS. (Mulyasa, 2009 : 117)

2. Pencatatan Keuangan (*Accounting*)

Kegiatan kedua dari manajemen pembiayaan adalah pembukuan atau kegiatan pengurusan keuangan. (Suharsini dan Lia, 2009 : 318). Hal-hal yang perlu dibukukan dalam keuangan sekolah adalah menyangkut penerimaan dan pengeluaran. Penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah dari sumber-sumber dana perlu dibukukan berdasarkan prosedur pengelolaan yang selaras dengan kesepakatan yang telah disepakati, baik

berupa konsep teoritis maupun peraturan pemerintah.

### 3. Pengawasan Keuangan (*Auditing*)

*Auditing* adalah semua kegiatan yang menyangkut pertanggung jawaban penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh seorang pemegang keuangan atau bendahara kepada pihak-pihak yang berwenang. (Suharsini dan Lia, 2009 : 318).

Pertanggungjawaban keuangan sekolah menyangkut seluruh pengeluaran dana sekolah dalam kaitannya dengan apa yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.



## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang mengambil lokasi di Madrasah Aliyah Negeri 1 Cililin. Sedangkan obyek kajian penelitian ini adalah tentang Manajemen Pembiayaan Madrasah. Oleh karena itu, selain berdasarkan pada survai dan data-data yang diperoleh, penulis juga berpijak pada kajian serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1. Skripsi Fatur Rohman, tahun 2008 yang berjudul “Studi tentang Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Se-Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara” (Muhlisin (NIM: 3101109) “Studi Tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah) Skripsi ini menjelaskan bahwa pelaksanaan manajemen pembiayaan pendidikan di internal madrasah atau yayasan menjadi sangat terbantu dengan adanya program BOS.
2. Skripsi Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul “Studi tentang Manajemen Keuangan Madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006”. Skripsi ini menjelaskan tentang pelaksanaan manajemen keuangan madrasah di Madrasah Aliyah Futuhiyyah 2 sudah berjalan dengan baik, hal ini dapat dilihat melalui perencanaan keuangan madrasah, pelaksanaan keuangan madrasah, evaluasi keuangan madrasah. (Skripsi Muhlisin, tahun 2007 yang berjudul “Studi tentang Manajemen Keuangan

Madarasah di Madrasah Aliyah Futuhiyah 2 Mranggen Demak Tahun Pelajaran 2005/2006”).

3. Skripsi Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang”. Skripsi ini menjelaskan pelaksanaan manajemen pendidikan sudah sangat baik, namun konsep manajemen pendidikan belum dilaksanakan secara utuh, untuk itu diperlukan peningkatan mutu pada madrasah yang meliputi manajemen kesiswaan, kurikulum, tata usaha, sarana prasarana, kepegawaian, keuangan dan hubungan masyarakat, serta adanya kerjasama dan koordinasi yang baik antara madrasah, masyarakat dan yayasan. (Skripsi Siti Faikoh, tahun 2006 yang berjudul “Pelaksanaan Manajemen Pendidikan di MI Al-Khoiriyah 2 Semarang”).
4. Skripsi Reni Marlinawati, tahun 2014 berjudul “Manajemen Pembiayaan Madrasah (Penelitian di Madrasah Tsanawiah Terpadu Yapisa Cireundeu Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak)”. Skripsi ini menjelaskan manajemen pembiayaan sangat menentukan keberlangsungan sebuah lembaga pendidikan dalam program-program dan infrastruktur serta peningkatan kualitas belajar.